



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SATRIADI GUNAWAN
2. Jabatan : KEPALA SATPOL PP
3. NHK : 233759

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.675.517.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000.000		
2. Tanah Seluas 333 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 925.407.000		
3. Tanah Seluas 2010 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
4. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.110.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISI OUTLANDER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>38.700.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>248.612.033</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.253.829.033</b>

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.	1.944.601.843
Rp.	4.309.227.190

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.